

Pengaruh PAD, Pendapatan Transfer, Belanja Hibah
Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Tingkat
Kemiskinan
(Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Periode 2020-2023)

Desti Putri Meysinta^{1*}, Zahriatul Aini²

^{1*,2} Politeknik Kutaraja, Jl. Syiah Kuala No.10, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota
Banda Aceh, Aceh 24415.

Corresponding Email : destiputrimaysinta@gmail.com^{1*}

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Hibah, dan Bantuan Sosial terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat pada periode 2020–2023, menggunakan regresi linier berganda dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, pendapatan transfer, hibah, dan bantuan sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan, dengan koefisien determinasi R^2 sebesar 0,241, yang menjelaskan 24,10% variasi kemiskinan dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Secara statistik, PAD, hibah, dan bantuan sosial memiliki pengaruh signifikan, sementara pendapatan transfer menunjukkan pengaruh yang lebih lemah dan tidak signifikan. Temuan ini menyarankan agar pembuat kebijakan mengoptimalkan alokasi belanja PAD, hibah, dan bantuan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara lebih efektif.

Kata kunci: Belanja Sosial; Pengeluaran Pemerintah; Pendapatan Daerah; Tingkat Kemiskinan.

Abstract. This study analyzes the effect of Local Original Revenue (PAD), Transfer Revenue, Grants, and Social Assistance on poverty rates in districts and cities in West Sumatra Province in the period 2020–2023, using multiple linear regression with secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The results of the study indicate that PAD, transfer revenue, grants, and social assistance together have a significant effect on poverty rates, with a determination coefficient R^2 of 0.241, which explains 24.10% of the variation in poverty and the rest is influenced by other variables not included in this study. Statistically, PAD, grants, and social assistance have a significant effect, while transfer revenue shows a weaker and insignificant effect. These findings suggest that policymakers optimize the allocation of PAD, grants, and social assistance spending to reduce poverty rates more effectively.

Keywords: Social Spending; Government Expenditure; Regional Income; Poverty Rate.

Pendahuluan

Sumber daya alam dan manusia di Indonesia sangat melimpah. Namun, tingkat kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan potensi kemakmuran tersebut, dengan banyaknya penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 9,3%, yang menunjukkan adanya hambatan signifikan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Faktor-faktor seperti pendapatan yang rendah, infrastruktur yang buruk, terbatasnya akses kredit, dan tingkat pengangguran yang tinggi menjadi penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Selain itu, kurangnya modal sosial dan finansial juga memperburuk kondisi kemiskinan (Esrael *et al.*, 2025). Kemiskinan bersifat politis dan melibatkan isu ketidakadilan sosial dan kekuasaan, yang mengharuskan adanya

pendekatan pemerintahan yang tepat untuk mengatasinya (Towers, 2025). Banyak anggapan yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari masyarakat miskin itu sendiri, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pekerjaan yang layak, serta ketergantungan pada upah yang tidak mencukupi. Dalam hal ini, negara memegang peran penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan (Kuntjorowati *et al.*, 2024). Pandemi COVID-19 juga menjadi faktor yang memperburuk tingkat kemiskinan, mengingat kesulitan masyarakat dalam mengakses kegiatan ekonomi dan sosial yang menyebabkan hilangnya sumber penghasilan dan pekerjaan (Wibisono *et al.*, 2022). Berikut adalah data mengenai tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2020–2023:

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2023

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	2020	6,28%
2	2021	6,63%
3	2022	5,92%
4	2023	5,95%

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi selama periode 2020-2023. Tingkat kemiskinan tertinggi tercatat pada tahun 2021, yang menurut Rencana Aksi Tahunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Pandemi ini memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, angka kemiskinan menurun pada tahun 2022, yang kemungkinan besar merupakan hasil dari upaya pemulihan ekonomi nasional serta program-program dukungan sosial, seperti bantuan tunai, bantuan sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH) (Noerkaisar, 2021). Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana untuk program-program kesejahteraan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Program bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi, dengan cara meningkatkan akses terhadap pangan atau menyediakan pendapatan bagi rumah tangga yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Ajisafe *et al.*, 2024).

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan bersifat kompleks dan dapat bervariasi karena sejumlah faktor. Salah satu faktor yang paling jelas adalah jenis pengeluaran yang dipertimbangkan. Pengeluaran pemerintah untuk transfer dan subsidi dapat mengurangi kemiskinan secara langsung (Anderson *et al.*, 2018). Penelitian (Rohadin & Nurcahyo, 2018) menunjukkan adanya pengaruh signifikan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan, sejalan dengan penelitian (Rizki *et al.*, 2023a) yang mengindikasikan bahwa pengeluaran hibah dan bantuan sosial secara

signifikan mempengaruhi kemiskinan. Namun, hal tersebut bertentangan dengan studi oleh (Islami Sari & Marissa, 2023); (Sendouw *et al.*, 2017); (Takasaping *et al.*, 2023) yang menunjukkan bahwa pengeluaran untuk bantuan sosial tidak memberikan dampak nyata terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami lebih dalam hubungan antara kemiskinan dengan pengeluaran hibah, bantuan sosial, pendapatan transfer, dan PAD. Kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dalam pendanaan pembangunan, terutama yang bertujuan mengurangi kemiskinan, tercermin dalam PAD. Pendapatan transfer, yang berasal dari pemerintah pusat, menjadi salah satu sumber utama anggaran daerah, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Penelitian oleh (Kawulur *et al.*, 2019) menunjukkan bahwa kemiskinan sangat dipengaruhi secara negatif oleh pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Pengeluaran pemerintah merupakan alat kebijakan utama yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, yang mencakup hibah dan bantuan sosial (Adebayo, 2025a). Efektivitas pengeluaran ini dalam menurunkan tingkat kemiskinan masih perlu diteliti lebih lanjut.

Fenomena yang menjadi dasar penelitian ini adalah: (1) Ketergantungan daerah pada pendapatan transfer, yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi dalam hal pendanaan (Maggara *et al.*, 2024); (2) Ketidakseimbangan PAD antar daerah; (3) Peningkatan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial; (4) Dampak pandemi COVID-19 terhadap kemiskinan, yang telah mengurangi aktivitas sosial dan ekonomi serta meningkatkan tingkat kemiskinan (Setyadi & Indriyani, 2021); (5) Tren fluktuasi tingkat kemiskinan; (6) Ketimpangan akses terhadap bantuan sosial, yang menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan sosial secara tepat sasaran, disebabkan oleh masalah seperti korupsi dan nepotisme (Puskomedia Indonesia, 2024); (7) Ketimpangan pendapatan yang mempengaruhi kualitas pembangunan sosial ekonomi dan memperlambat laju kemajuan daerah menuju kesejahteraan umum (Ji *et al.*, 2024). Untuk memberikan wawasan lebih lanjut

dalam penelitian ini, penting untuk memahami hubungan antara kemiskinan dengan pendapatan daerah, pendapatan transfer, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara PAD, pendapatan transfer, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat selama periode waktu tersebut.

Tinjauan Literatur

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah. PAD berperan penting dalam memperkuat kemandirian finansial daerah dan menyediakan dana untuk berbagai layanan publik serta inisiatif pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pajak, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan lainnya, termasuk retribusi, merupakan contoh komponen PAD. Untuk mencapai pendapatan yang optimal, pengelolaan PAD memerlukan pendekatan yang terstruktur dan efisien (Mustomi *et al.*, 2024). PAD dapat diartikan sebagai seluruh pemasukan pemerintah daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah, pelayanan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk membiayai kegiatan atau program daerah tersebut (Nusa & Panggalo, 2022). Agar otonomi dan kemandirian daerah dapat terlaksana secara efektif dan bertanggung jawab, PAD perlu terus ditingkatkan sehingga sebagian dapat menutupi peningkatan pengeluaran tahunan yang diperlukan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sulung *et al.*, 2022).

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah sejumlah dana yang diterima oleh suatu entitas pelaporan dari entitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu aliran pendapatan yang cukup signifikan dalam struktur APBD adalah pendapatan transfer atau uang perimbangan (Kuhua *et al.*, 2019). Sumber pendanaan lain yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan

kewenangannya dalam mencapai tujuan pembangunan, khususnya dalam rangka memberikan otonomi kepada daerah, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu pelayanan (Sulung *et al.*, 2022).

Belanja Hibah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 2016, hibah adalah transfer sumber daya dalam bentuk uang atau barang dari satu pemerintah Indonesia ke pemerintah lain, badan usaha milik daerah (BUMD), lembaga, organisasi masyarakat, atau badan hukum lainnya di negara ini. Inisiatif pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan daerah dirancang untuk memperoleh hibah ini. Penyaluran hibah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan, dan pelaksanaan tugas pemerintahan, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepatuhan. Belanja hibah juga berfungsi untuk mengembangkan usaha ekonomi serta mengoptimalkan sumber daya dan teknologi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola kemiskinan (Kusuma, 2022).

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah dana yang disalurkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan bantuan barang atau keuangan secara tidak berkesinambungan dan selektif kepada individu, kelompok, keluarga, atau masyarakat untuk mencegah risiko sosial. Risiko sosial tersebut dapat meningkatkan kerentanan individu atau kelompok terhadap masalah sosial. Penyaluran bantuan sosial tidak wajib dilakukan setiap periode anggaran, melainkan berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Program ini juga bertujuan untuk membantu meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan membiayai kebutuhan yang mendesak, seperti pemenuhan pangan dan kesehatan (Rulandari *et al.*, 2022).

Kemiskinan

Kemiskinan bukan hanya sekadar memiliki pendapatan yang rendah, tetapi juga mencakup ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan juga terkait dengan

ketidakmampuan memenuhi kewajiban sosial dan ekonomi, tidak memiliki pekerjaan, keterampilan, atau aset yang cukup, serta terbatasnya akses terhadap infrastruktur sosial dan ekonomi (Obadire, 2022). Selain itu, kemiskinan juga dipengaruhi oleh standar hidup yang lebih rendah yang dihitung berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar sesuai dengan standar budaya yang lebih luas (Pierre, 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu daerah, termasuk PAD, pendapatan transfer, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Penelitian oleh Nany *et al.* (2022) mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dapat menurunkan tingkat kemiskinan, dengan efek yang cukup besar. Sementara itu, penelitian oleh Khawarizmi *et al.* (2021) menunjukkan bahwa PAD, pendapatan transfer, dan dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian Rizki *et al.* (2023) juga mengindikasikan bahwa pengeluaran hibah dan bantuan sosial secara bersamaan memiliki dampak besar terhadap penurunan kemiskinan.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.
- H2: Pendapatan Transfer berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.
- H3: Belanja Hibah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.
- H4: Belanja Bantuan Sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.
- H5: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk menganalisis data numerik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), berupa data sekunder untuk periode 2020–2023. Data yang digunakan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan serta menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota selama periode 2020–2023. Penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh, atau yang dikenal sebagai teknik sensus, karena seluruh elemen populasi digunakan sebagai sampel (Masnidar Nasution, 2017).

Pendekatan ini dianggap sesuai karena setiap daerah di provinsi ini memiliki karakteristik sosial, ekonomi, demografis, dan geografis yang beragam. Oleh karena itu, teknik sensus dipilih untuk memastikan bahwa heterogenitas antarwilayah, baik daerah yang relatif maju maupun yang masih tertinggal, dapat terwakili secara utuh. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif dan regresi linier berganda. Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta uji signifikansi (uji t dan uji F) dan koefisien determinasi. Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak pengolahan data statistik SPSS versi 25. Pengumpulan data dilakukan melalui strategi dokumentasi, yakni dengan menghimpun dan menganalisis informasi dari berbagai sumber resmi. Penelitian ini juga menggunakan skala rasio untuk mengukur setiap variabel yang diteliti, dengan rumus dan penjelasan variabel disajikan pada bagian berikutnya.

Tabel 2. Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Rumus
1	Pendapatan Asli Daerah	$PAD = (Total\ PAD : Total\ Pendapatan) \times 100\ %$
2	Pendapatan Transfer	$PT = (PT : Total\ Pendapatan) \times 100\ %$
3	Belanja Hibah	$PBH = (BH : TBD) \times 100\ %$
4	Belanja Bantuan Sosial	$PBBS = (BBS : TBD) \times 100\ %$
5	Kemiskinan	$K = (JPM : Total\ Penduduk) \times 100\ %$

Keterangan:

- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- PT : Pendapatan Transfer
- PBH : Proporsi Belanja Hibah
- BH : Belanja Hibah
- TBH : Total Belanja Daerah
- PBBS : Proporsi Belanja Bantuan Sosial
- BBS : Belanja Bantuan Sosial
- TBD : Total Belanja Daerah
- K : Kemiskinan

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 3 di bawah ini, nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020-2023 adalah sebesar 0,1070. Nilai ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut, PAD rata-rata berkontribusi sebesar 10,70% terhadap total pendapatan daerah.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

No.	Variabel	Rata-Rata	Minimum	Maximum
1	Pendapatan Asli Daerah	0.1070	0.0381	0.2851
2	Pendapatan Transfer	0.8121	0.0764	0.8950
3	Belanja Hibah	0.0261	0.0025	0.0662
4	Belanja Bantuan Sosial	0.0024	0.0000	0.0089
5	Kemiskinan	0.0615	0.0216	0.1484

Berdasarkan Tabel 3, nilai minimum Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar 0,0381, yang menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat pernah mengalami PAD terendah sebesar 3,81% dari total pendapatan daerah. Di sisi lain, selama periode 2020-2023, Provinsi Sumatera Barat juga mencatatkan PAD tertinggi sebesar 0,2851, atau setara dengan 28,51% dari total pendapatan daerah. Perbedaan yang signifikan ini mencerminkan adanya disparitas fiskal antar kabupaten/kota di provinsi tersebut. Disparitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kapasitas ekonomi lokal, kemampuan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta tingkat optimalisasi potensi unggulan daerah masing-masing. Berdasarkan Tabel 3, nilai rata-rata pendapatan transfer tercatat sebesar 0,8121, yang berarti selama periode 2020-2023, pendapatan transfer menyumbang rata-rata sebesar 81,21% dari total pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat. Nilai minimum pendapatan transfer sebesar 0,0764 menunjukkan bahwa pada beberapa tahun, kontribusi pendapatan transfer hanya sebesar 7,64% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, pada periode yang sama, Provinsi Sumatera Barat juga pernah mencatatkan nilai maksimum pendapatan transfer sebesar 0,8950 atau 89,50%, menunjukkan ketergantungan daerah yang cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, terutama bagi daerah yang memiliki PAD rendah.

Berdasarkan Tabel 3, rata-rata belanja hibah tercatat sebesar 0,0261, yang berarti rata-rata alokasi belanja hibah selama periode 2020-2023 adalah 2,61% dari total belanja daerah. Nilai minimum belanja hibah sebesar 0,0025 menunjukkan bahwa ada tahun di mana belanja hibah hanya berkontribusi sebesar 0,25%. Di sisi lain, pada beberapa tahun, Provinsi Sumatera Barat juga mencatatkan nilai maksimum belanja hibah sebesar 0,0662 atau 6,62% dari total belanja daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa beberapa kabupaten/kota mengalokasikan belanja hibah secara signifikan, sementara yang lain hanya mengalokasikannya dalam jumlah yang relatif kecil. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh prioritas kebijakan dan struktur belanja masing-masing daerah. Selanjutnya, nilai rata-rata belanja bantuan sosial selama periode 2020-2023 tercatat sebesar 0,0024, yang berarti kontribusi belanja bantuan sosial terhadap total belanja daerah adalah 0,24%. Nilai minimum belanja bantuan sosial tercatat sebesar 0,0000, yang menunjukkan bahwa ada tahun-tahun tertentu atau daerah yang tidak mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial. Sementara itu, nilai maksimum belanja bantuan sosial tercatat sebesar 0,0089 atau 0,89%, menunjukkan adanya perbedaan alokasi bantuan sosial di setiap daerah. Ketidakhadiran program bantuan sosial di beberapa daerah mengindikasikan bahwa distribusi perlindungan sosial belum merata di seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Tabel 3, nilai rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2020-2023 tercatat sebesar 0,0615, atau 6,15% dari total penduduk di kabupaten/kota. Nilai minimum tingkat kemiskinan tercatat sebesar 0,0216, yang berarti bahwa beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat kemiskinan yang sangat rendah, yaitu 2,16%. Sebaliknya, nilai maksimum tingkat kemiskinan tercatat sebesar 0,1484 atau 14,84%, yang menunjukkan adanya ketimpangan tingkat kemiskinan antar daerah. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh ketidakseimbangan distribusi belanja sosial dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Estimasi Regresi Linier Berganda

Hasil estimasi regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak SPSS 25 ditampilkan pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

No.	Variabel	β	Std. Error
1	Constant	9.706	3.110
2	Pendapatan Asli Daerah	-0.164	.069
3	Pendapatan Transfer	-0.009	.032

4	Belanja Hibah	-0.206	.160
5	Belanja Bantuan Sosial	-2.24	1.016

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda yang ditampilkan pada Tabel 4, nilai konstanta sebesar 9,706 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat antara tahun 2020 hingga 2023 akan bertambah secara konstan jika variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial tetap pada tingkat yang sama. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,164%, dengan koefisien beta sebesar -0,164. Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,009% terjadi akibat kenaikan pendapatan transfer sebesar 1%, yang tercermin dari koefisien beta pendapatan transfer sebesar -0,009. Selanjutnya, setiap kenaikan belanja hibah sebesar 1% akan mengurangi tingkat

kemiskinan sebesar 0,026%, berdasarkan koefisien beta belanja hibah sebesar -0,026. Selain itu, pengeluaran untuk bantuan sosial memiliki koefisien beta sebesar -2,24, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran bantuan sosial sebesar 1% akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 2,24%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data residual yang digunakan dalam model regresi terdistribusi normal. Hal ini penting untuk validitas hasil regresi linier, karena salah satu asumsi dasar regresi adalah bahwa data residual mengikuti distribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

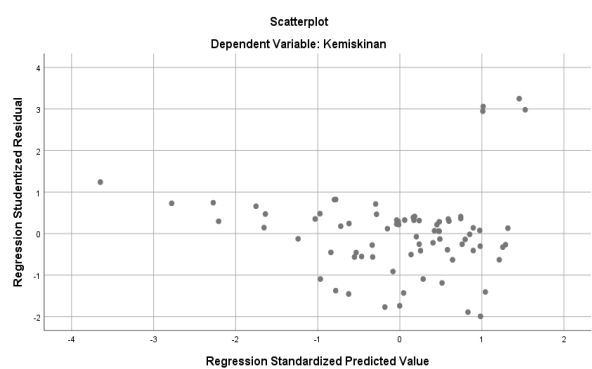
		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00342349
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.057
	Negative	-.089
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan Tabel 5 di atas, nilai Asymp. Sig. sebesar 0,200 menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (Hair *et al.*, 2019a). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa galat data (residual) terdistribusi normal, yang mengindikasikan bahwa asumsi normalitas dalam model regresi ini terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi adanya ketidakteraturan dalam variasi residual pada model regresi, yang dapat mempengaruhi validitas estimasi koefisien regresi. Jika terdapat pola tertentu yang jelas pada grafik residual, maka hal tersebut menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika titik residual tersebar secara

acak tanpa pola yang jelas, maka model regresi dapat dianggap tidak mengalami heteroskedastisitas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa pada grafik heteroskedastisitas tidak terdapat pola yang jelas, dan titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan, yang berarti variasi residual adalah konstan di seluruh nilai prediksi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas yang tinggi dapat

mengganggu kestabilan koefisien regresi dan menyebabkan hasil analisis yang tidak valid. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut: jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau Tolerance kurang dari 0,1, maka terdapat indikasi multikolinearitas (Ghozali, 2016). Berdasarkan hasil analisis, nilai VIF dan Tolerance untuk masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolineritas

No.	Variabel	T	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah	0.563	1.777
2	Pendapatan Transfer	0.624	1.604
3	Belanja Hibah	0.926	1.080
4	Belanja Bantuan Sosial	0.920	1.088

Berdasarkan tabel di atas, seluruh nilai VIF tercatat kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini. Artinya, tidak terdapat hubungan linier yang kuat antar variabel independen, yang memungkinkan model regresi untuk diinterpretasikan dengan lebih valid.

Uji Signifikansi

Uji F / Uji Simultan

Hasil output uji F untuk uji simultan, yang dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 25, adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji F

F	5.643
Sig.	0.001

Temuan dari uji F yang disajikan pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,001, yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ (Hair *et al.*, 2019b). Di Provinsi Sumatera Barat, hasil ini mengindikasikan bahwa angka kemiskinan di kabupaten dan kota dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Uji t / Uji Parsial

Hasil output uji t menggunakan perangkat lunak SPSS 25 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji t

No	Variabel	t	Sig.	Keterangan	Kesimpulan
1	Constant	3.121	0.003	Signinifikan	
2	Pendapatan Asli Daerah	-2.384	0.02	Signinifikan	H1 diterima
3	Pendapatan Transfer	-0.28	0.78	Tidak Signifikan	H2 ditolak
4	Belanja Hibah	-1.284	0.203	Tidak Signifikan	H3 ditolak
5	Belanja Bantuan Sosial	-2.205	0.031	Signinifikan	H4 diterima

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,02, yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa PAD

secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, meskipun nilai signifikansi untuk pendapatan transfer sebesar 0,78, yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$,

menunjukkan bahwa pendapatan transfer tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Untuk belanja hibah, nilai signifikansi tercatat sebesar 0,203, yang juga lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa belanja hibah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, belanja bantuan sosial menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,031, yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$,

mengindikasikan bahwa belanja bantuan sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan output yang diperoleh dari SPSS, berikut adalah hasil ringkasan model yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.491	0.241	0.198	2.19272

Nilai R Square (R^2) sebesar 0.241 mengindikasikan bahwa 24.1% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh model ini melalui keempat variabel independen yang digunakan. Sementara itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0.198 menunjukkan penyesuaian nilai R Square berdasarkan jumlah variabel bebas yang digunakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 19.8% variasi pada variabel dependen dijelaskan oleh keempat variabel bebas tersebut setelah penyesuaian, sedangkan sisanya sebesar 80.2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat pada periode 2020 hingga 2023. Nilai koefisien beta yang negatif menunjukkan bahwa peningkatan PAD, yang mencakup pajak dan retribusi daerah, akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Peningkatan PAD akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan lebih banyak layanan publik yang diperlukan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat (Sima *et al.*, 2023). Hasil ini relevan dengan studi yang dilakukan oleh Fitriyanti & Handayani (2020), Wididarma & Jember (2021), dan Manek & Badrudin (2016),

yang semuanya menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan PAD terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil regresi, pendapatan transfer tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020-2023. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Adebayo (2025), Manek & Badrudin (2016b), dan Hasan *et al.* (2021), yang menunjukkan bahwa pendapatan transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Meskipun demikian, program-program pendapatan transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan pendapatan transfer dalam menurunkan kemiskinan antara lain:

- 1) Keterbatasan sumber daya alam (SDA) dan infrastruktur yang tidak memadai di beberapa daerah di Sumatera Barat, yang menghambat penggunaan pendapatan transfer secara optimal untuk pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Jolianis, 2016).
- 2) Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, akibat ketidaktersediaan data sosial ekonomi yang akurat dan dapat diandalkan.
- 3) Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan,

mengimplementasikan, dan mengawasi program pembangunan, yang mengurangi efektivitas penggunaan pendapatan transfer dalam mengentaskan kemiskinan.

- 4) Pengaruh norma sosial dan budaya setempat, yang dapat mempengaruhi cara masyarakat memanfaatkan bantuan yang diberikan (Nazmi & Ajidin, 2024).
- 5) Distribusi pendapatan transfer yang tidak merata, yang membuat program bantuan sosial tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat miskin, sehingga mengurangi dampaknya dalam menurunkan kemiskinan (Alifah *et al.*, 2020).

Pengaruh Belanja Hibah terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja hibah berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat pada periode 2020-2023. Semakin meningkatnya belanja hibah, semakin rendah angka kemiskinan, sesuai dengan koefisien beta negatif yang ditemukan. Program-program hibah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), telah terbukti membantu masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan pangan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan (Rarun *et al.*, 2018; Sumarsono *et al.*, 2022). Dengan bantuan tersebut, diharapkan pola pengeluaran keluarga dapat berubah, terutama dalam memperoleh kebutuhan dasar pangan, sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga (Dian Veronika Zalukhu *et al.*, 2024).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Penelitian ini menemukan bahwa pada periode 2020 hingga 2023, gabungan variabel PAD, pendapatan transfer, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam variabel independen, seperti PAD, pendapatan transfer, belanja hibah, dan belanja bantuan

sosial, dapat menjelaskan perubahan dalam tingkat kemiskinan. Penelitian ini konsisten dengan temuan yang dilakukan oleh Rizki *et al.* (2023c), Alfath *et al.* (2025), dan Nany *et al.* (2022b), yang menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah-daerah yang diteliti.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada periode 2020–2023. Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,164 persen untuk setiap kenaikan 1 persen PAD menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah dapat mengurangi kemiskinan. Peningkatan PAD memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih optimal mengalokasikan dana untuk program-program pengentasan kemiskinan, seperti subsidi pangan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat (Fitriyanti & Handayani, 2020; Wididarma & Jember, 2021). Sebagai sumber utama pendanaan bagi daerah, PAD yang lebih tinggi memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai program pembangunan, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Sulung *et al.*, 2022). Pendapatan Transfer, meskipun merupakan salah satu sumber utama anggaran daerah, tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Adebayo (2025b) dan Manek & Badrudin (2016b), yang menunjukkan bahwa pendapatan transfer tidak cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan. Beberapa faktor seperti keterbatasan infrastruktur, ketidakakuratan data sosial ekonomi, dan rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program pembangunan dapat mengurangi efektivitas pendapatan transfer dalam mengurangi kemiskinan (Nazmi & Ajidin, 2024). Dengan demikian, meskipun pendapatan transfer dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan publik, pengelolaannya yang tidak tepat sasaran dapat membatasi dampaknya. Belanja Hibah

menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Setiap peningkatan 1 persen dalam belanja hibah mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0,206 persen. Hibah digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan daerah, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan infrastruktur lokal. Program hibah yang tepat sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi, yang sejalan dengan temuan Rarun *et al.* (2018) dan Sumarsono *et al.* (2022), yang mengindikasikan bahwa belanja hibah berpengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan. Melalui alokasi yang tepat, hibah dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Selain itu, belanja Bantuan Sosial memiliki dampak yang sangat besar terhadap pengurangan kemiskinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 persen dalam belanja bantuan sosial dapat menurunkan kemiskinan sebesar 2,24 persen. Program-program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT terbukti efektif dalam memberikan perlindungan sosial kepada keluarga miskin, serta meringankan beban ekonomi mereka (Rizki *et al.*, 2023b). Pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial ekonomi, yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan sosial. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan belanja bantuan sosial memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan transfer dan belanja hibah dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa faktor-faktor independen seperti PAD dan belanja sosial memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan (Rizki *et al.*, 2023c; Alfath *et al.*, 2025). Untuk itu, pengoptimalan PAD dan peningkatan alokasi belanja sosial merupakan langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara lebih efektif.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial pada periode 2020–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan belanja bantuan sosial secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan, sementara pendapatan transfer dan belanja hibah tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, strategi peningkatan PAD dan pengalokasian yang lebih optimal untuk belanja bantuan sosial terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan. Kontribusi orisinal dari penelitian ini terletak pada analisis gabungan antara PAD dan pendapatan transfer dalam konteks pemulihan pascapandemi COVID-19. Dengan menggunakan data lintas waktu dan wilayah secara panel, penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai dinamika fiskal daerah dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Hasil temuan ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan secara efektif.

Penelitian ini juga memberikan analisis baru mengenai variabel-variabel yang memengaruhi fluktuasi tingkat kemiskinan, dengan fokus pada Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2023. Pendekatan yang lebih spesifik terhadap wilayah ini memperkaya literatur yang ada, dengan menawarkan perspektif yang lebih dalam terkait kondisi lokal yang jarang dibahas sebelumnya. Selain itu, penelitian ini mengangkat dampak eksternal seperti pandemi COVID-19 yang turut mempengaruhi tingkat kemiskinan, memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana krisis global mempengaruhi kondisi kemiskinan di tingkat daerah. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, hanya variabel kuantitatif yang digunakan dalam analisis ini, sementara aspek kualitatif seperti kepemimpinan daerah, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat belum dipertimbangkan. Kedua, penggunaan data sekunder membuka kemungkinan bias karena keterbatasan akurasi atau kelengkapan data yang

tersedia. Berdasarkan temuan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mendiversifikasi sumber PAD, terutama dengan memprioritaskan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar seperti pariwisata, UMKM, dan ekonomi digital. Untuk pengentasan kemiskinan yang lebih optimal, perhatian khusus perlu diberikan kepada efektivitas program bantuan sosial, dengan memastikan distribusinya tepat sasaran. Pemerintah pusat juga disarankan untuk lebih fleksibel dalam merancang kebijakan fiskal serta memperkuat evaluasi terhadap program bantuan sosial, dengan memberikan perhatian lebih pada kelompok rentan yang memerlukan dukungan lebih besar. Meskipun pendapatan transfer tidak menunjukkan dampak langsung yang besar, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap sangat penting untuk mendukung kebijakan yang mengurangi kemiskinan melalui pembangunan berkelanjutan. Peningkatan sistem pengelolaan anggaran daerah yang lebih efektif dan transparan juga diperlukan. Kolaborasi antar sektor publik dan swasta menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan membuka prospek ekonomi baru. Dengan mempererat kerjasama antara pihak-pihak terkait, diharapkan akan tercipta dampak positif dalam pengurangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi peran digitalisasi dalam layanan publik serta inovasi kebijakan lokal untuk menangani kemiskinan secara lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Adebayo, T. (2025). Funding the future: Nigeria's battle against poverty through government expenditure. *Journal of Government and Economics*, 17, 100137.
- Ajisafe, R. A., Okunade, S. O., & Fatai, M. O. (2024). Modelling structural breaks in social cash transfers effects on poverty and inequality reduction in Africa: A case of Nigeria. *Scientific African*, 23, e02106.
- ALIFAH, A., YOZZA, H., & ASDI, Y. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Dengan Menggunakan Analisis Regresi Panel. *Jurnal Matematika UNAND*, 9(1), 53-61.
<https://doi.org/10.25077/jmu.9.1.53-61.2020>.
- Al-Khawarizmi, M. A., Marseto, M., & Sishadiyati, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Malang (pp. 122-131). Muhammadiyah University North Sumatra.
- Anderson, E., d'Orey, M. A. J., Duvendack, M., & Esposito, L. (2018). Does government spending affect income poverty? A meta-regression analysis. *World Development*, 103, 60-71.
- DAN, M. P. A. N. (2011). KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR SKJ. 18 TAHUN 20222022 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR.
- de Jonge, J. (2006). Multivariate Data Analysis. *Gedrag & Organisatie*, 19(3).
- Debora, D., Kantohe, M., Tarore, S., & Rantung, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 123-129.
- Esrael, E., Worku, A., Cucchi, C., Belay, A., Recha, J. W., & Tafesse, A. (2025). Status

- and determinants of multi-dimensional poverty in Wolaita Sodo Town, southern Ethiopia. *Journal of Agriculture and Food Research*, 19, 101562.
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79-90.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23.
- Guy-Robert, P. (2020). Poverty in Haiti. *Open Journal of Political Science*, 10(03), 407-427.
- Hasan, S., Iskandar, D. I., & Rumianti, S. (2021). Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Desa Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i3.2335>.
- Islami Sari, D., & Marissa, F. (2023). Pengaruh belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap kemiskinan di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 346–359. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.238>.
- Ji, Q., Yang, J., Chu, Y., Chen, H., & Guo, X. (2024). Inequality of rural residents' income in China since the targeted poverty alleviation strategy: New trends, causes, and policy implications. *Research in Cold and Arid Regions*, 16(4), 201–213.
- Jolianis. (2016). Analisis pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. *Economica*, 4(2), 193–216. <https://doi.org/10.22202/economica.v4i2.633>.
- Kuntjorowati, E., Andari, S., Prayoga, R. A., Yusuf, H., Soegiharto, S., Fatimah, S., Listyawati, A., Yuniarti, L., Suryani, & Hakim, F. N. (2024). Effectiveness of strengthening social protection and security programs in alleviating poverty in rural areas through multi-sector partnerships. *Heliyon*, 10(23). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40485>.
- Kusuma, S. E. (2022). ANALISIS HUBUNGAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DENGAN PENDAPATAN MASYARAKAT: STUDI PADA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 2(3), 402-409.
- Maggara, T. S., Putri, B. K., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). ANALISIS KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PUSAT DAN DAMPAKNYA PADA KEMANDIRIAN FISKAL. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 6(4).
- Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2).
- Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., & Kusumaningsih, A. U. (2022). Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dak Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 22(03).
- Nasution, L. M. (2017). Statistik deskriptif. *Hikmah*, 14(1), 49-55.
- Nazmi, F., & Ajidin, A. (2024). Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh. *Journal Publicubo*, 7(3), 1135–1143. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.468>.

- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104.
<https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>.
- Obadire, A. M. (2022). Analysis of the impact of microfinancing on poverty alleviation in Nigeria. *Journal of Financial Risk Management*, 11(03), 648–657.
<https://doi.org/10.4236/jfrm.2022.113031>.
- Purwaningsih, Y., Hakim, L., & Mulyaningsih, T. (2024). Interplay Between Poverty, Poverty Eradication and Sustainable Development: A Semi-Systematic Literature Review. *Global Transitions*.
- Rarun, C. C. E., Kawung, G. M., & Niode, A. O. (2018). ANALISIS PENGARUH BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01).
- Rizki, I., Zulgani, Z., & Hodijah, S. (2021). *Pengaruh belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi periode Tahun 2001-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Rulandari, N., Natisation, A., Esien, E. B., & Kesmawan, A. P. (2022). The policy implementation of social ministry's cash assistance program during the Covid-19 pandemic in Jakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(1), Layouting.
<https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i1.13113>.
- Sendouw, A., Rumate, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2017). Pengaruh belanja modal, belanja sosial, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–15.
<https://doi.org/10.35794/jpekd.15780.19.2.2017>.
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan resiko kemiskinan di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 53-66.
- Sima, M., Liang, P., & Qingjie, Z. (2023). The impact of fiscal decentralization on economic growth: A comparative analysis of selected African and OECD countries. *Helicon*, 9(9), e19520.
<https://doi.org/10.1016/j.helicon.2023.e19520>.
- Sulung, G. J., Walewangko, E. N., & Masloman, I. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 109-120.
- Sumarsono, H., Yusida, E., & Alma'amun, S. (2022). The impact of macroeconomic effect and fiscal policy on poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14(2), 230.
<https://doi.org/10.17977/um002v14i22022p230>.
- Suryaningsih, A. (2023). Analisis kontribusi pajak daerah dan redistribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Blitar. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 5(1), 1-14.
- Takasaping, S. C., Rotinsulu, T. O., & Naukoko, A. T. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(10), 97-108.
- Towers, L. (2025). To manage or abolish energy poverty? A governmentality analysis. *Energy Research and Social Science*, 120(December 2024), 103880.
<https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103880>.
- Wibisono, R. (2022). Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Resiko Peningkatan

Kemiskinan di Indonesia. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 3(1), 21-40.

Wididarma, K., & Jember, M. (2021). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10(7), 2982-3010.